



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN ANGGARAN 2023



Jl. KH. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar
Telp. 0271 - 495176 Fax. 0271 - 494426 email : inspektorat_kra@yahoo.com
website : <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2018 - 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, Februari 2024

Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR



WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.

Fembina

NIP.

Rahasia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR	3
2.1 Visi Dan Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar.....	3
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2.3 Standard Operating Prosedure (SOP) Inspektorat Kabupaten Karanganyar.....	6
2.4 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan	6
2.5 Struktur Organisasi	7
2.6 Kepegawaian	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9
3.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	9
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	15
4.1 Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengawasan	15
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	16
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL ..	17
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	18
BAB VIII PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi, informasi dan kedewasaan masyarakat di era saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai modal pencapaian peran pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan bersih (*clean goverment*) di Kabupaten Karanganyar, perlu ditopang dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Manajemen pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dari siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena suatu proses maka kegiatan yang dilakukan tidak ada akhirnya, secara berkesinambungan proses tersebut harus mengarah kepada semakin dekatnya pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan mempunyai peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar berperan sebagai umpan balik dalam penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah berfungsi memberikan jasa kegiatan yang bersifat *early warning system* (peringatan dini), konsultasi, dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan berjalannya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar, perlu didukung jalinan komunikasi dengan baik antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan OPD lain di Kabupaten Karanganyar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Karanganyar, melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
4. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
5. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2023.

Tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk :

1. Memberikan informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar “**Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Tangguh**”.

Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu mengacu pada Visi tersebut maka disusunlah Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengawasan yang Berkualitas, Handal dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tercapainya Pemerintahan yang Baik;
3. Melaksanakan Koordinasi dan atau Konsultasi Pengawasan Menuju Pengawasan yang Lebih Sinergis;
4. Melaksanakan Pemantauan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pengawasan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Prioritas kegiatannya antara lain :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan dan Asistensi tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan maka Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan SOP guna mencapai tujuan tugas dengan efektif dan efisien. SOP tersebut ditetapkan dalam Keputusan Inspektorat Kabupaten Karanganyar No. 900/35/2013 Tentang SOP dan Prosedur Pemeriksaan yang terdiri dari SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, SOP Inspektorat Pemeriksaan Khusus, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Inspektorat Pemeriksaan Tujuan Tertentu, dan SOP Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

D. PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/500 Tahun 2018 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2021.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor Adapun Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

D. KEPEGAWAIAN

Tabel 2.1 DAFTAR PEGAWAI INSPEKTORAT

NO	NAMA	NIP	STATUS	JABATAN
1	WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.	<i>Rahasia</i>	PNS	Plt. Inspektur Daerah
2	Dra. ENY FAUZIAH, M.M.		PNS	Sekretaris
3	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.		PNS	Inspektur Pembantu Wilayah III
4	DAHONO, S.I.P., M.Si.		PNS	Inspektur Pembantu Wilayah IV
5	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.		PNS	Inspektur Pembantu Wilayah II
6	SRI HERLINA, S.H., M.Hum.		PNS	Inspektur Pembantu Wilayah I
7	AGUS MURDIYANTO, S.E., M.M.		PNS	Inspektur Pembantu Khusus
8	AGUNG BUDIYARTO, S.H.		PNS	Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
9	PERMATA ARIYANTO NUGROHO, S.E., M.M.		PNS	Kepala Sub Bagian Administrasi Dan Umum
10	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.		PNS	Auditor Ahli Muda
11	TRI WULAN AJI, S.Sos., M.M.		PNS	Auditor Kepegawaian Madya
12	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.		PNS	Auditor Madya
13	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos.		PNS	Auditor Madya
14	MULYATI, S.E., M.Acc.		PNS	Auditor Madya
15	RETNO RINAWATI, S.H., M.M.		PNS	Auditor Madya
16	RAHDRIAWATI, S.I.P.		PNS	Auditor Kepegawaian Muda
17	Dra. SUNARMI, M.M.		PNS	P2UPD Madya
18	HARTUTI, S.E.		PNS	P2UPD Madya
19	HENI KUSTIYAWATI, S.H., M.M.		PNS	P2UPD Madya
20	CICUK DWI HANDOKO, S.E., M.Si.		PNS	Auditor Muda
21	INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.		PNS	Auditor Muda
22	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.		PNS	Auditor Muda
23	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.		PNS	Auditor Muda
24	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.		PNS	Auditor Muda
25	RISKHA AMALLIA INDRIAWATI, S.H., M.Si.		PNS	Auditor Muda
26	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.		PNS	Auditor Muda
27	SUPRAYITNO, S.T.		PNS	Auditor Muda
28	WAHYUNINGSIH, S.H.		PNS	Auditor Muda
29	ARTTIKA RAHMA SARI, S.E., M.Ak.		PNS	Auditor Muda
30	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.		PNS	P2UPD Muda

NO	NAMA	NIP	STATUS	JABATAN
31	BASRI SETYOWATI, S.Sos.	<i>Rahasia</i>	PNS	P2UPD Muda
32	C ANDI MURTOPO, S.Sos.		PNS	P2UPD Muda
33	NURUL BADRIYAH, S.E.		PNS	Perencana Ahli Muda
34	JAKA MARYANTO, S.H.		PNS	Auditor Pertama
35	SUTIRAH DUWI RAHAYU, S.P.		PNS	Auditor Pertama
36	IIS ISTIQOMAH NUR FAJAR, A.Md.		PNS	Auditor Terampil
37	NUR INDAH SARI, A.Md.		PNS	Auditor Terampil
38	DEWI SURYANINGSIH, S.H.		PNS	Calon Auditor
39	MIYA SUNDARI, S.H.		PNS	Calon Auditor
40	RETNO WULANDARI, S.H.		PNS	Calon Auditor
41	SURYA AFRIZAL, S.H., M.M.		PNS	Calon Auditor
42	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, S.E.		PNS	Penata Laporan Keuangan
43	FAUZY HENDRO PURNOMO, S.E.		PNS	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
44	PURWADI		PNS	Pengadministrasi Umum
45	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.	PNS	Penyusun Rencana Pengawasan	
46	SUGIYONO	PNS	Petugas Keamanan	
47	WAHYU KRISTİYANTO, A.Md.Kom.	PNS	Calon Pranata Komputer	
48	AGUS SUPRAPTO, SE	-	THL	Pengadministrasi
49	ANGGIT APRILIYA PAMUNGKAS	-	THL	Pengadministrasi Kendaraan Dinas
50	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	THL	Pengadministrasi Keamanan Dan Ketertiban
51	SHINTA PUTRI SARI, S.E.	-	THL	Pengadministrasi Kebersihan
52	SEKAR RIZKY MAHANANI, S.Pd.	-	THL	Pengadministrasi
53	DWI KURNIAWATI	-	THL	Resepsionis
54	PRISCHA RINNA SETIYANINGSIH, S.I.Kom.	-	THL	Pengadministrasi

2.2 DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARA TAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKA TAN
1.	WIDODO FERIYANTO, S.E., Ak., M.Si.	Plt. INSPEKTUR DAERAH	Memenuhi	Memenuhi
2.	Dra. ENY FAUZIAH, M.M.	SEKRETARIS	Memenuhi	Memenuhi
3.	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	Memenuhi	Memenuhi
4.	DAHONO, S.I.P., M.Si.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	Memenuhi	Memenuhi
5.	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	Memenuhi	Memenuhi
6.	SRI HERLINA, S.H., M.Hum.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	Memenuhi	Memenuhi
7.	AGUS MURDIYANTO, S.E., M.M.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	Memenuhi	Memenuhi
8.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Memenuhi	Memenuhi
9.	PERMATA ARIYANTO NUGROHO, S.E., M.M.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	Memenuhi	Memenuhi

2.3 DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.	<i>Rahasia</i>	AUDITOR AHLI MUDA
2.	TRI WULAN AJI, S.Sos., M.M.		AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA
3.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.		AUDITOR MADYA
4.	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos.		AUDITOR MADYA
5.	MULYATI, S.E., M.Acc.		AUDITOR MADYA
6.	RETNO RINAWATI, S.H., M.M.		AUDITOR MADYA
7.	RAHDRIAWATI, S.I.P.		AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA
8.	Dra. SUNARMI, M.M.		P2UPD MADYA

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
9.	HARTUTI, S.E.	<i>Rahasia</i>	P2UPD MADYA
10.	HENI KUSTIYAWATI, S.H., M.M.		P2UPD MADYA
11.	CICUK DWI HANDOKO, S.E.,M.Si.		AUDITOR MUDA
12.	INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.		AUDITOR MUDA
13.	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.		AUDITOR MUDA
14.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.		AUDITOR MUDA
15.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.		AUDITOR MUDA
16.	RISKHA AMALLIA INDRIAWATI, S.H., M.Si.		AUDITOR MUDA
17.	SHINTA KUSUMA DEWI, S.H.		AUDITOR MUDA
18.	SUPRAYITNO, S.T.		AUDITOR MUDA
19.	WAHYUNINGSIH, S.H.		AUDITOR MUDA
20.	ARTTIKA RAHMA SARI, S.E.,M.Ak.		AUDITOR MUDA
21.	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.		P2UPD MUDA
22.	BASRI SETYOWATI, S.Sos.		P2UPD MUDA
23.	C ANDI MURTOPO, S.Sos.		P2UPD MUDA
24.	NURUL BADRIYAH, S.E.		PERENCANA AHLI MUDA
25.	JAKA MARYANTO, S.H.		AUDITOR PERTAMA
26.	SUTIRAH DUWI RAHAYU, S.P.		AUDITOR PERTAMA
27.	IIS ISTIQOMAH NUR FAJAR, A.Md.		AUDITOR TERAMPIL
28.	NUR INDAH SARI, A.Md.		AUDITOR TERAMPIL
29.	DEWI SURYANINGSIH, S.H.		CALON AUDITOR
30.	MIYA SUNDARI, S.H.		CALON AUDITOR
31.	RETNO WULANDARI, S.H.		CALON AUDITOR
32.	SURYA AFRIZAL, S.H., M.M.		CALON AUDITOR
33.	WAHYU KRISTIYANTO, A.Md.Kom.		CALON PRANATA KOMPUTER

2.4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	FAUZY HENDRO PURNOMO, S.E.	<i>Rahasia</i>	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
2.	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, S.E.		Penata Laporan Keuangan
3.	PURWADI		Pengadministrasi Umum
4.	NANDIKA SARI WIDATA, S.H., M.H.		Penyusun Rencana Pengawasan
5.	SUGIYONO		Petugas Keamanan
6.	AGUS SUPRAPTO, SE	-	Pengadministrasi
7.	ANGGIT APRILIYA PAMUNGKAS	-	Pengadministrasi Kendaraan Dinas
8.	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	Pengadministrasi Keamanan Dan Ketertiban
9.	SHINTA PUTRI SARI, S.E.	-	Pengadministrasi Kebersihan
10.	SEKAR RIZKY MAHANANI, S.Pd.	-	Pengadministrasi
11.	DWI KURNIAWATI	-	Resepsionis
12.	PRISCHA RINNA SETIYANINGSIH, S.I.Kom.	-	Pengadministrasi

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,16 skor Ket. :
2		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/ level 1/ level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,00 skor Ket. :

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan/Dokumen	1 Laporan/ Dokumen (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 85.000.000,00 Realisasi: Rp. 85.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Snack, Makan dan Minum 1250 dos	1250 dos (100.00%)		

		Daerah					
		c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
		d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah dan laporan pelaksanaan tugas 2 Laporan	2 Laporan (100.00%)		
		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A,	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 3.500.000,00 Realisasi: Rp. 3.500.000,00	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase: (100,00%)				
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 3.500.000,00 Realisasi: Rp. 3.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Belum ada indikator 12 Dokumen	12 Dokumen (100.00%)		
				3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi 100 %	100 % (100.00%)		
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 43.645.000,00 Realisasi: Rp. 43.394.000,00 Persentase: (99,42%)	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang pelihara 1 Paket	1 Paket (100.00%)		

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 53.358.700,00 Realisasi: Rp. 53.358.700,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL 3 Paket dan orang	3 Paket dan orang (100.00%)	
			3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.839.920,00 Persentase: (63,36%)	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara 1 Paket	1 Paket (100.00%)	
		g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 50.000.000,00 Persentase: (100,00%)	"Terselenggara nya penatausahaan arsip Tenaga THL Arsip" 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	

		h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 279.000.500,00 Realisasi: Rp. 251.308.061,00 Persentase: (90,07%)	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
		i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 89.302.000,00 Persentase: (89,30%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Unit Gedung Kantor yang Disediakan 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 665.000.000,00 Realisasi: Rp. 661.500.000,00 Persentase:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional a yang Disediakan 2 unit	2 unit (100.00%)		

			(99,47%)				
			3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 27.885.500,00 Realisasi: Rp. 24.939.000,00 Persentase: (89,43%)	Jumlah laptop, printer, router, HD SSD 7 Unit	7 Unit (100.00%)		
		j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.799.750,00 Persentase: (89,00%)	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai 48 Satuan	48 Satuan (100.00%)		
		k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Belum ada indikator 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 25.000.000,00 Persentase: (100,00%)	"Jumlah logistik kantor Jumlah tabung LPG" 1 paket	1 paket (100.00%)		
				3) Penyediaan Bahan/Material Anggaran: Rp. 105.968.800,00 Realisasi: Rp. 104.609.100,00 Persentase: (98,72%)	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket	1 paket (100.00%)		
				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 65.115.500,00 Realisasi: Rp. 59.611.600,00 Persentase: (91,55%)	"Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjilidan" 1 paket	1 paket (100.00%)		
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 6.925.859.356,00 Realisasi: Rp. 6.436.924.427,00 Persentase: (92,94%)	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN 100 %	100 % (100.00%)		

		Daerah						
		m . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 178.650.000,00 Realisasi: Rp. 128.532.615,00 Persentase: (71,95%)	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	Efisiensi anggaran karena jasa internet dialihkan ke layanan Dinas Kominfo	Tetap menggunakan layanan kominfo	
		n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 241.420.000,00 Realisasi: Rp. 219.024.325,00 Persentase: (90,72%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya 24 Unit	24 Unit (100.00%)			
		o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 45.000.000,00	Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket 12 bulan	12 bulan (100.00%)	Serapan anggaran dibawah 75% karena pengiriman surat	Penyesuaian anggaran untuk penganggaran surat menyurat	

		DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi: Rp. 30.384.900,00 Persentase: (67,52%)			menggunakan aplikasi Srikandi	pada tahun berikutnya
		p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 22.009.680,00 Persentase: (88,04%)	"Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran" 1 paket	1 paket (100.00%)		
			2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data Belum Tersedia			
		q. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan,	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terwujudnya rencana strategis, rencana kerja, tujuan dan indikator kinerja yang terukur dan jelas 5 Dokumen	5 Dokumen (100.00%)		

			Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*Nihil***C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	INSPEKTORAT		a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Kerja Sama Pengawasan Internal Anggaran: Rp. 301.375.000,00 Realisasi: Rp. 280.871.000,00 Persentase: (93,20%)	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 0 Kesepakatan, Jumlah laporan pencegahan dan	0 Kesepakatan, 9 Laporan, 9 Bulan (50.00%)		

					pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar 12 Laporan, Terselenggaranya rapat koordinasi 12 Bulan			
		b. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Anggaran: Rp. 304.960.000,00 Realisasi: Rp. 260.923.500,00 Persentase: (85,56%)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0 Kegiatan, Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7 Laporan	0 Kegiatan, 7 Laporan (50.00%)			
		c. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan	1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Anggaran: Rp. 566.349.000,00	Jumlah THL 4 Orang, Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Hasil	4 Orang, 41 Obrik, 0 Kegiatan (66.67%)			

		Pengawasan Internal	Realisasi: Rp. 438.180.350,00 Persentase: (77,37%)	Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP 41 Obrik, Larwasda 1 Kegiatan		
		d. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Data Belum Tersedia		
		e. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Anggaran: Rp. 265.700.000,00 Realisasi: Rp. 210.053.200,00 Persentase: (79,06%)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 perangkat daerah, Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	0 perangkat daerah, 1 Kegiatan (50.00%)	

					Integritas 1 Kegiatan			
				2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Anggaran: Rp. 70.600.000,00 Realisasi: Rp. 66.500.000,00 Persentase: (94,19%)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 12 perangkat daerah	12 perangkat daerah (100.00%)		
				3) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran: Rp. 203.010.000,00 Realisasi: Rp. 195.192.885,00 Persentase: (96,15%)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 41 perangkat daerah	41 perangkat daerah (100.00%)		
		f. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Data Belum Tersedia				

		Tertentu					
		g. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Pengawasan Desa Anggaran: Rp. 250.000.000,00 Realisasi: Rp. 226.233.500,00 Persentase: (90,49%)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 32 LHP	32 LHP (100.00%)		
			2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Data Belum Tersedia			
			3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Data Belum Tersedia			
		h. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 93.176.600,00 Persentase: (93,18%)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi, Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1 PKPT	0 Rekomendasi, 1 PKPT (50.00%)		
			2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Anggaran: Rp. 70.270.000,00 Realisasi: Rp. 59.977.250,00 Persentase:	0 Rekomendasi, Peningkatan level kapabilitas APIP 3 Level	Rekomendasi, Level (%)		

			(85,35%)				
			3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Anggaran: Rp. 70.270.000,00 Realisasi: Rp. 59.977.250,00 Persentase: (85,35%)	0 Rekomendasi, Peningkatan level kapabilitas APIP 3 Level	Rekomendasi, Level (%)		
		i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1) Reviu Laporan Keuangan Anggaran: Rp. 308.951.000,00 Realisasi: Rp. 289.264.420,00 Persentase: (93,63%)	Jumlah Hasil Reviu LKPD dan LK OPD 11 LHP, Jumlah Hasil Reviu DAK 24 LHP, Jumlah Hasil Reviu RKA/RKAP 41 LHP, Jumlah Hasil Reviu RKPD/RKPD Perubahan 41 LHP, Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 Laporan	11 LHP, 24 LHP, 41 LHP, 41 LHP, 0 Laporan (80.00%)		
			2) Reviu Laporan Kinerja Anggaran: Rp. 100.300.000,00 Realisasi: Rp. 93.435.000,00 Persentase: (93,16%)	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi 41 LHE, Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0	41 LHE, 1 Laporan, 1 LHP, 1 LHP (100.00%)		

					Laporan, Jumlah reuiu LKJiP 1 LHP, Jumlah reuiu LPPD 1 LHP				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H. UNSUR KEWILAYAHAN*Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VII**INOVASI DAN PENGHARGAAN****A. INOVASI**

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
------------	---------------------	------------------

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	10 besar MCP Jawa Tengah	KPK

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat sebagai Unsur Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Selain tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga mempunyai fungsi sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan asset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Juga meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama Tahun Anggaran 2023 tugas pokok dan fungsi tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup menghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;

B. SARAN

Peningkatan pelaksanaan program Inspektorat Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik di Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada umumnya;
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

**Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**



WIDODO FERİYANTO, S.E.,Ak.,M.Si.
Pembina
NIP.